



www.janabadra.ac.id  
**UNIVERSITAS  
JANABADRA**

## PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN 2021/2022



**PROGRAM SARJANA (S1)**

FAKULTAS HUKUM  
Hukum (A)

FAKULTAS PERTANIAN  
Agribisnis (A)

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
Ek. Pembangunan (B)  
Akuntansi (B)  
Manajemen (B)

FAKULTAS TEKNIK  
Teknik Mesin (B)  
Informatika (B)  
Teknik Sipil (B)

**PROGRAM MAGISTER (S2)**

Magister Hukum (B)  
Magister Manajemen (B)  
Magister Teknik Sipil (B)

Potongan 1 juta sampai bulan juni  
kecuali prodi hukum





### PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL MALIOBORO

## Paguyuban Minta Pembahasan Raperda Ditunda

**YOGYA (KR)** - Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro meminta penundaan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penataan dan pemberdayaan PKL yang dinilai merugikan dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Pasalnya, raperda yang disusun untuk pemberdayaan PKL disinyalir memiliki motif yang berhubungan dengan penataan kawasan Malioboro secara besar-besaran.

Raperda yang terkesan terburu-buru dinilai tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Para PKL mempertanyakan urgensinya di tengah pandemi Covid-19 yang mencekik kehidupan mereka. "Pertama, soal waktu tidak tepat karena teman-teman kan sedang susah akibat dampak Covid-19. Dalam kondisi ini harusnya yang ditawarkan program-program yang meringankan beban PKL, tapi justru yang diberikan perda yang

menyulitkan," ujar Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo Putra pada diskusi terbatas bersama LKBI UII dan seluruh paguyuban PKL Yogyakarta, Selasa (15/6) di Kantor LKBI UII.

Bukan tanpa alasan PKL menilai raperda dibuat terburu-buru, sebab draf rancangan perda yang sempat digulirkan mengandung banyak kesalahan baik secara teknis penulisan yang terlihat copy paste dari daerah lain dan konten yang ti-

dak pas.

"Dari sisi proses penyusunan dan isin perda, kita anggap disusun secara terburu-buru, sembrana, banyak sekali pasal yang tidak tepat dan yang paling fatal di ketentuan umum. Misalnya soal Satpol PP (padahal konteksnya PKL), masih mengambil definisi dari perda kabupaten di Jawa Tengah dan lupa menghapus," paparnya.

Oleh sebab itu, seluruh anggota paguyuban meminta agar pembahasan raperda menunggu waktu yang tepat, setidaknya setelah pandemi Covid-19 selesai dan secara penghasilannya para PKL sudah stabil. Sebab hal ini menyangkut hak hidup ratusan ribu orang.

Direktur LKBH UII, Bambang Sutyoso, mengatakan Raperda PKL meliputi 3 stakeholders yang berkaitan yakni Pemkot Yogyakarta, PKL, dan

masyarakat luas yang akan merasakannya. Sebelumnya dia menyoroti ihwal Perda Nomor 26 tahun 2002 tentang penataan PKL yang sudah ada.

"Apakah pernah dilakukan evaluasi, analisis SWOT, sehingga ada reasoning (alasan) kuat untuk diperbaiki atau diganti dengan Perda yang baru. Idealnya perubahan atau penggantian regulasi harus lebih dulu dilakukan kajian pakar dan riset empiris untuk mendapatkan masukan mendalam sebagai dasar dilakukan perubahan atau penggantian. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 sekarang, apakah Raperda ini sudah urgent dan mendesak untuk diterapkan?," tanyanya.

Penataan lokasi harus dilakukan secara tepat dan adil. Hak, kewajiban dan larangan dalam Pasal 32-36 belum seimbang, lebih dominan kewajiban



KR - Wulan Yanuarwati  
**Diskusi menakar aspek pemberdayaan dalam Raperda revisi atas Perda penataan dan pemberdayaan PKL.**

dan larangan daripada haknya. Langkah yang akan ditempuh oleh Paguyuban PKL ialah segera mengajukan surat penundaan kepada DPRD Kota Yogyakarta, melakukan Forum Discussion Group (FGD) dan meminta agar DPRD Kota Yogyakarta memfasilitasi pertemuan antara stakeholders, pemerintah dan DPRD itu sendiri agar terjadi diskusi yang sehat dan tidak menimbulkan kegaduhan. **(R-1)-f**

### KENAIKAN KASUS MINGGUAN CAPAI 80 PERSEN

## Shelter Wilayah Kembali Dihidupkan

**YOGYA (KR)** - Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya akan kembali menghidupkan shelter yang ada di wilayah. Langkah tersebut untuk mengantisipasi keterbatasan lokasi isolasi mandiri akibat lonjakan penambahan kasus Covid-19.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, menjelaskan Shelter Tegalrejo kapasitasnya sudah mendekati penuh. "Tadi malam informasinya masih ada enam kamar yang kosong. Tapi kalau semua dimasukkan ke sana ya tidak akan cukup. Makanya kita akan meminta wilayah untuk menghidupkan kembali shelter-shelter di wilayah," tandasnya, Selasa (15/6).

Shelter isolasi mandiri di wilayah sebagian besar menempati balai RW maupun ruang pertemuan. Pasien Covid-19 tanpa gejala yang tidak memiliki tempat representatif untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya, dapat menempati shelter di wilayah. Kebutuhan logistik harian tidak perlu dikhawatirkan karena sudah dicukupi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogya.

Selain menghidupkan kembali shelter di wilayah, Heroe mengaku akan mengupayakan penambahan tempat isolasi mandiri di gedung pemerintah. Terutama yang pernah digunakan sebelumnya seperti Balai Pendidikan dan Pelatihan milik Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian Sosial maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Jika gedung yang pernah kita gunakan dulu sudah tidak bisa lagi, kita akan carikan tempat lain. Yang penting ada tambahan tempat representatif untuk isolasi mandiri," urainya.

Terkait potensi lonjakan kasus, menurutnya cukup dinamis. Pihaknya merekam kenaikan kasus mingguan mencapai kisaran 70 hingga 80 persen. Tren tersebut terjadi dalam kurun waktu seminggu terakhir. "Jadi kalau rata-rata seminggu itu ada tambahan 130 kasus, sekarang sudah mencapai sekitar 200 kasus lebih. Kita lebih efektif melihat kasus mingguan dibanding harian karena kecepatan laboratorium itu tidak sama," jelas Heroe.

Oleh karena itu, terhadap tren peningkatan yang cukup tinggi tersebut maka upaya pengetatan mutlak dilakukan. Salah satunya patroli secara acak di tempat wisata setiap akhir pekan. Sat Pol PP akan diback up petugas ketertiban di wilayah dalam mengawasi destinasi wisata. Akhir pekan lalu bahkan ada tiga bus yang diarahkan putar balik karena tidak mampu menunjukkan kelengkapan identitas kesehatan seluruh penumpangnya. Pengunjung dari zona merah harus mendapat pengawasan ketat seiring anjuran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. **(Dhi)-f**

### SINERGI 'TRIPLE HELIX' SANGAT PENTING

## Sektor Pendidikan Penopang Perekonomian

**YOGYA (KR)** - Sektor pendidikan menjadi salah satu pilar utama penopang perekonomian DIY, selain pariwisata. Di era pandemi ini, di mana teknologi informasi (digital) berkembang lebih cepat, perlu dimanfaatkan untuk mendorong sektor pendidikan di DIY agar lebih maju lagi.

Demikian dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DIY GKR Mangkubumi saat membuka Webinar bertajuk Investing and Empowering Yogyakarta Education Sector through Innovation, Critical Thinking and Competency Base Learning, Selasa (15/6). Webinar diselenggarakan oleh Royal Blue Lantern Foundation dan Pinterk didukung Kadin DIY.

Pembicara dalam webinar yakni Ioann Fainsilber dan Tommy Yuwono (Co-Founder Pinterk), Didik Wardaya SE MPd (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY), Agus Priyono (Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal/DPPM DIY), Dr Hargo Utomo (Director of Business Development and Incubation UGM) dipandu moderator George Iwan Marantika.

Menurut Mangkubumi, banyak investor yang berinvestasi di DIY. Selain itu banyak juga sekolah-sekolah yang muncul dan berkembang di DIY untuk semua jenjang, meskipun masih ada sekolah yang belum bisa mengakses teknologi informasi secara keseluruhan. Sehingga diperlukan penyempurnaan perangkat, sistem dan pendukung lainnya.

"Di sinilah pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi dan dunia usaha (triple helix) untuk memunculkan inovasi-inovasi dalam mendukung kemajuan pendidikan di DIY. Kadin DIY sudah memulai, dan saya harap muncul masukan dan wacana-wacana baru dalam webinar ini," katanya.

Agus Priyono mengatakan, dibanding provinsi lain di Indonesia, DIY termasuk yang sedikit sumber daya alamnya. Namun DIY dikenal sebagai kota kreatif, kota pelajar dan pendidikan yang memiliki 107 perguruan tinggi (negeri/swasta) dengan jumlah mahasiswa lebih dari 350.000. "Inilah mengapa sektor pendidikan menjadi penggerak utama perekonomian DIY," katanya. **(Dev)-f**

*Kedaulatan Rakyat*

# EPAPER

www.kr.co.id




**Berlangganan  
Scan Barcode**



*Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggaman tangan Anda. Sekarang.*